

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Ghofur Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Azhari, Muhammad dan Rudi Indrajaya, 2001, *Mengenai Sisminbakum*, Cetakan II, CV Dinamika Putera, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil C.S.T. dan Christine Kansil, 2013, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwaka, Tommy Hendra, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Purwosujipto, H. M. N., 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, 2012, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Rukiah, Putri Ayub, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Medan: Softmedia.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse akta, dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sibuea, Hotma Pardomuan dan Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakataw Book, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditanama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Syahrani, Ridwan, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta.

Tobing, Lumban G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Erlangga, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Untung, Budi, 2001, *Visi Global Notaris*, ANDI, Yogyakarta.

Widjaya, I.G.A. Rai, 2000, *Hukum Perusahaan*. Cetakan I, Kesaint Blanc, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan

## **MEDIA MASSA/ARTIKEL**

Hadi, Mudofir, “Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72”, Pembatalan Isi Akta Notaris “Dengan Putusan Hakim”, (September 1991) : 142-143.

Hadjon, Philipus M., “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*”, Surabaya Post, 31 Januari 2001.

## JURNAL

Budianto, Agus, *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*, International Journal of Criminology and Sociology, Vol. 20, issue (9), 2020. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>

Gumilang, Tia Sanitra, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, Jurnal Lex Renaissance No 1 Vol 4, Januari 2019.

Oktavia, Ria, *Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan*, E-Jurnal: Spirit Pro Partia Vol V No 1, Maret 2019.

Permatasari, Erina dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Online*, Jurnal Akta Vol 4 No 3, September 2017.

